



Pemkot Pontianak Tujuh Kali WTP



SUARA PEMRED/KRISTIAWAN BALASA

PRESTASI - Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Rita Amelia menyerahkan predikat WTP kepada Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (30/5).

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2017 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat WTP kali ini diterima Pemkot Pontianak berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK dan diserahkan oleh Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Rita Amelia kepada Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (30/5).

Mahmudah mengungkapkan walau mendapat predikat WTP atas laporan keuangan, ada beberapa item yang perlu penyempurnaan

• **Baca Halaman 15**

Hal 9 | ■ pemkot pontianak

dan hal ini sudah ditindaklanjuti. Dia pun mengajak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Pontianak untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan.

"Semoga ke depan tidak ada temuan dan bisa sempurna," kata Mahmudah.

Dia mengatakan selama ini OPD sudah bekerja dengan baik. Namun memang tidak boleh berpuas diri dan mesti ada peningkatan ke depan. Jangan sampai ada hal yang masuk temuan. Predikat WTP harus

terus dipertahankan.

"Kita berharap juga untuk laporan keuangan tahun 2018 meraih predikat yang sama yakni WTP," sebutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Rita Amelia mengatakan, dari hasil pemeriksaan BPK terhadap sepuluh entitas, terdapat delapan entitas yang meraih predikat WTP, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten

Sintang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah.

"Dua entitas lain opininya masih tetap WDP yakni Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sambas," tuturnya.

Dia menjelaskan pencapaian opini WTP tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan dalam laporan pengelolaan keuangan. Hal-hal yang masih ditemukan di antaranya pengelolaan aset tetap dan persediaan di beberapa pemerintah daerah yang belum memadai masih terjadi.

"Walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materalitas yang telah ditentukan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Pontianak tercatat meraih predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut, yakni ketika laporan diberikan BPK tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Predikat tersebut diberikan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan masing-masing setahun sebelumnya. **(bls/bob)**